Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4081-4091
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Normalisasi Hubungan Arab Saudi-Iran 2023: Analisis Balance of Threat dan Strategi Hedging Arab Saudi

Latiefah Filberr[1], Inka Viona Syakila[2], Haura Rizqiyah Putri Anasya[3], Muthia Karini[4], Muchammad Yustian Yusa[5], Muhammad Ridwan Afandi[6], Muhammad Naufan Rizqullah[7]

[1,2,3,4,5,6,7]Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
m.naufan@fisip.unsri.ac.id

Abstract

The Saudi Arabia-Iran rapprochement announced in Beijing on 10 March 2023 ended a diplomatic rupture dating back to 2016 and has often been read as a sign of a shifting Middle Eastern order. This article analyzes Saudi Arabia's motives by combining Stephen Walt's balance of threat theory with the concept of hedging. Using a descriptive-analytical qualitative method based on secondary data, the study argues that the normalization reflects a reduced perception of direct threat combined with efforts to diversify strategic partners amid doubts about the United States' security commitment and Riyadh's need for regional stability to support Vision 2030. The article concludes that normalization is better understood as a risk-management hedging strategy than as a fundamental end to the rivalry.
Keywords : Saudi Arabia; Iran; normalization; balance of threat; hedging

Abstrak

Pemulihan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran yang diumumkan di Beijing pada 10 Maret 2023 mengakhiri keterputusan hubungan sejak 2016 dan sering dibaca sebagai tanda pergeseran tatanan Timur Tengah. Artikel ini menganalisis motif Arab Saudi dalam normalisasi tersebut dengan menggabungkan teori balance of threat Stephen Walt dan konsep hedging. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan data sekunder dari literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan lembaga kajian strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa normalisasi tidak mencerminkan berakhirnya rivalitas, melainkan penurunan persepsi ancaman langsung terhadap Saudi yang dikombinasikan dengan upaya diversifikasi mitra strategis di tengah keraguan atas komitmen keamanan Amerika Serikat dan kebutuhan menjaga stabilitas bagi agenda Visi 2030. Artikel ini menyimpulkan bahwa normalisasi lebih tepat dipahami sebagai strategi hedging untuk mengelola risiko, bukan perubahan mendasar dari rivalitas ideologis dan geopolitik.
Kata Kunci : Arab Saudi; Iran; normalisasi; balance of threat; hedging

Copyright (c) 2026 Latiefah Filberr, Inka Viona Syakila, Haura Rizqiyah Putri Anasya, Muthia Karini, Muchammad Yustian Yusa, Muhammad Ridwan Afandi, Muhammad Naufan Rizqullah

✉Corresponding author: Latiefah Filberr
Email Address: m.naufan@fisip.unsri.ac.id (Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia)
Received 3 Oktober 2026, Accepted 10 Oktober 2026, Published 29 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Arab Saudi dan Iran adalah dua kekuatan regional utama di kawasan Teluk yang rivalitasnya membentuk dinamika konflik di Timur Tengah, mulai dari Yaman, Suriah, hingga Lebanon dan Irak. Hubungan diplomatik keduanya terputus pada Januari 2016 setelah eksekusi ulama Syiah Nimr al-Nimr di Arab Saudi dan penyerangan terhadap kedutaan besar Saudi di Teheran. Sejak saat itu, rivalitas berlangsung melalui perang proksi, termasuk konflik di Yaman yang melibatkan koalisi pimpinan Saudi sejak Maret 2015 melawan kelompok Houthi yang mendapat dukungan dari Teheran.

Pada 10 Maret 2023, Arab Saudi dan Iran mengumumkan kesepakatan trilateral di Beijing untuk memulihkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar masing-masing dalam jangka waktu dua bulan dengan mediasi Republik Rakyat Tiongkok. Berdasarkan Teks Pernyataan Bersama Trilateral (2023), kesepakatan ini juga menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip kedaulatan,

non-intervensi, serta pengaktifan kembali Perjanjian Kerja Sama Keamanan 2001 dan Perjanjian Umum Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Teknologi, dan Kebudayaan 1998. Putaran pembicaraan awal telah difasilitasi oleh Irak dan Oman pada kurun waktu 2021-2022 sebelum penandatanganan di Beijing. Kedutaan Besar Iran di Riyadh dan Kedutaan Besar Saudi di Teheran secara resmi dibuka kembali pada pertengahan 2023.

Secara kronologis, kesepakatan Beijing perlu ditempatkan sebagai tahap akhir dari proses penjajakan yang telah berlangsung sebelumnya, bukan sebagai hasil negosiasi yang sepenuhnya dimulai oleh Tiongkok. Pernyataan resmi tiga negara menyebutkan adanya putaran dialog yang difasilitasi Irak dan Oman pada 2021–2022, kemudian dilanjutkan perundingan di Beijing pada 6–10 Maret 2023. Pengakuan eksplisit terhadap kedua fasilitator awal tersebut penting karena memperlihatkan kesinambungan diplomasi kawasan. Dengan demikian, perubahan yang menonjol pada Maret 2023 bukan semata munculnya mediator baru, tetapi tercapainya keputusan politik untuk memulihkan representasi diplomatik melalui saluran yang telah dipersiapkan (Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, 2023).

Isi kesepakatan juga perlu dibaca berdasarkan tingkat komitmennya. Pemulihan kedutaan, pertemuan menteri luar negeri, penghormatan kedaulatan, dan pengaktifan kembali perjanjian kerja sama merupakan langkah institusional yang dapat diidentifikasi secara konkret. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak mengatur penyelesaian seluruh sengketa proksi, mekanisme verifikasi perilaku aktor non-negara, ataupun kewajiban pertahanan bersama. Karena itu, normalisasi hubungan diplomatik tidak identik dengan perdamaian menyeluruh. Pembedaan antara komitmen yang tertulis dan harapan politik yang lebih luas diperlukan agar penilaian mengenai keberhasilan kesepakatan tidak melampaui bukti yang tersedia dalam dokumen primer (Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, 2023).

Peristiwa ini menarik secara teoretis karena dua faktor mendasar. Pertama, mediator utama adalah Tiongkok, bukan Amerika Serikat yang selama beberapa dekade menjadi pilar mitra keamanan utama Arab Saudi. Kedua, normalisasi dilakukan saat Riyadh masih menganggap program nuklir dan jaringan milisi regional Iran sebagai potensi ancaman serius. Artinya, normalisasi tidak otomatis menandakan hilangnya rivalitas strategis. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah: bagaimana teori *balance of threat* dan konsep *hedging* menjelaskan keputusan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Iran pada 2023?

Kajian terdahulu mengenai topik ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Utomo (2023) dalam analisanya menekankan keberhasilan Tiongkok dalam menggeser peran dominan diplomasi Barat di kawasan Teluk. Fulton dan Yellinek (2023) menyoroti bagaimana keterlibatan Beijing mencerminkan reposisi geopolitik Tiongkok yang memanfaatkan kekosongan kepemimpinan diplomasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara itu, Guzansky dan Lindenstrauss (2023) berfokus pada ketidakpastian domestik serta kerapuhan komitmen keamanan yang mendorong negara-negara Teluk mencari artikulasi diplomasi baru. Namun, literatur yang ada cenderung berfokus pada kompetisi hegemoni Amerika Serikat-Tiongkok atau peran Tiongkok sebagai mediator. Celah penelitian yang

hendak diisi oleh artikel ini terletak pada analisis berfokus pada sisi Arab Saudi sebagai aktor utama pembeli kebijakan (*policy choice*), dengan mengintegrasikan persepsi ancaman domestik-regional (*balance of threat*) dan kalkulasi diversifikasi risiko strategis (*hedging*).

Secara analitis, artikel ini membedakan tiga tingkat penjelasan. Pertama, struktur ancaman kawasan menjelaskan mengapa Iran tetap diperhitungkan dalam kebijakan keamanan Saudi. Kedua, kalkulasi kebijakan luar negeri menjelaskan alasan Riyadh membuka komunikasi meskipun ancaman belum sepenuhnya hilang. Ketiga, kepentingan pembangunan domestik menjelaskan mengapa penurunan eskalasi memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Pemisahan tingkat penjelasan ini mencegah kesimpulan yang terlalu sederhana bahwa mediasi Tiongkok sendirian menyebabkan normalisasi atau bahwa berkurangnya konflik diplomatik dengan sendirinya berarti berakhirnya rivalitas geopolitik.

Kerangka Konseptual

Balance of Threat

Walt (1987) mengoreksi pandangan neorealis klasik dengan menyatakan bahwa negara tidak sekadar menyeimbangkan kekuatan material (*balance of power*), melainkan menyeimbangkan ancaman (*balance of threat*). Tingkat ancaman ditentukan oleh empat faktor utama: kekuatan agregat, kedekatan geografis, kemampuan ofensif, dan niat ofensif yang dipersepsikan. Kerangka ini relevan untuk menganalisis kawasan Timur Tengah karena pembentukan aliansi dan keputusan kebijakan luar negeri kerap dipengaruhi oleh persepsi ancaman rezim serta ancaman transnasional (Gause, 2010; Hinnebusch & Ehteshami, 2014).

Keempat indikator Walt dapat digunakan sebagai perangkat analisis yang berbeda, bukan sebagai daftar faktor yang otomatis berubah secara serentak. Kekuatan agregat berkaitan dengan sumber daya militer, ekonomi, dan kapasitas mobilisasi suatu negara. Kedekatan geografis mengacu pada jarak yang memungkinkan suatu ancaman menjangkau wilayah strategis dengan cepat. Kemampuan ofensif menunjuk pada sarana untuk menimbulkan kerugian, sedangkan niat ofensif merupakan penilaian mengenai kemauan politik menggunakan sarana tersebut. Perbedaan antardimensi ini membantu menjelaskan mengapa ancaman tetap dianggap serius meskipun negara memilih memperbaiki hubungan diplomatik (Walt, 1987).

Dalam kasus Saudi–Iran, kedekatan geografis dan keberadaan kemampuan ofensif tidak otomatis berubah setelah penandatanganan kesepakatan. Dimensi yang mungkin lebih responsif terhadap diplomasi ialah persepsi niat ofensif jangka pendek dan perkiraan kemungkinan eskalasi. Dengan kata lain, perubahan kebijakan Riyadh dapat berlangsung tanpa penurunan signifikan pada potensi material Iran. Pembacaan tersebut menghindari kekeliruan menganggap pembukaan kedutaan sebagai bukti langsung bahwa keseimbangan militer kawasan telah berubah. Penurunan persepsi ancaman juga perlu diperlakukan sebagai inferensi dari pilihan kebijakan, bukan hasil pengukuran psikologis elite Saudi yang tersedia secara langsung.

Hedging

Kuik (2008) mendefinisikan *hedging* sebagai perilaku negara menengah atau kecil yang menolak untuk memilih secara tegas antara *balancing* (menyeimbangkan) atau *bandwagoning* (mengekor) terhadap kekuatan besar. Strategi ini dilakukan dengan mengombinasikan kebijakan yang tampak berlawanan—seperti memperkuat kerja sama pertahanan sekaligus membangun hubungan ekonomi-diplomatik dengan pihak lain—untuk mengurangi risiko dan menjaga fleksibilitas opsi strategis di masa depan. Dalam studi ini, *hedging* digunakan untuk menguraikan perilaku Arab Saudi yang tetap mempertahankan kemitraan keamanan dengan Amerika Serikat sambil memperluas hubungan ekonomi-politik dengan Tiongkok dan membuka saluran diplomasi dengan Iran.

Penerapan konsep hedging kepada Arab Saudi memerlukan penyesuaian konseptual. Kerangka Kuik (2008) semula dikembangkan untuk memahami pilihan negara yang menghadapi ketidakpastian dalam kompetisi kekuatan besar. Arab Saudi bukan negara kecil dalam konteks Timur Tengah, dan Iran bukan kekuatan besar global dengan kedudukan yang identik dengan Amerika Serikat atau Tiongkok. Oleh sebab itu, istilah hedging dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menyamakan semua relasi tersebut, melainkan untuk mengidentifikasi pola diversifikasi instrumen keamanan dan diplomasi yang dijalankan Riyadh secara bersamaan.

Indikator operasional hedging dapat dirumuskan melalui tiga ciri: mempertahankan hubungan keamanan yang sudah ada, menambah kemitraan dengan aktor lain tanpa mengganti seluruh komitmen terdahulu, dan membuka saluran komunikasi terhadap pihak yang sebelumnya dipandang sebagai ancaman. Jika ketiga ciri tersebut hadir bersamaan, kebijakan Saudi menunjukkan unsur pengelolaan risiko di bawah ketidakpastian. Namun, keberadaan hubungan ekonomi dengan Tiongkok saja tidak cukup untuk membuktikan hedging. Bukti yang lebih kuat muncul ketika hubungan ekonomi, opsi diplomatik, dan kerja sama pertahanan dinilai secara bersamaan sebagai satu rangkaian pilihan kebijakan (Kuik, 2008; Alterman, 2023).

Kompleks Keamanan Regional

Buzan dan Wæver (2003) memandang Timur Tengah sebagai kompleks keamanan regional (*regional security complex*), di mana dinamika keamanan antarnegara saling terikat secara erat sehingga masalah keamanan satu negara tidak dapat dipisahkan dari negara lainnya. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana penurunan ketegangan bilateral Saudi-Iran berdampak langsung pada stabilitas lanskap keamanan di Yaman, Irak, dan Lebanon.

Perspektif kompleks keamanan regional memperlihatkan bahwa hubungan bilateral Saudi–Iran berkaitan dengan konflik yang memiliki aktor dan kepentingan sendiri. Pemerintah Yaman, Houthi, serta aktor politik di Irak dan Lebanon tidak semata menjadi penerima pasif dari keputusan Riyadh dan Teheran. Akibatnya, perbaikan hubungan kedua negara dapat menurunkan tekanan lintas negara tanpa secara otomatis menyelesaikan perselisihan domestik di masing-masing arena konflik. Jalal (2023), misalnya, menekankan bahwa proses peredaan ketegangan Saudi–Iran dan penyelesaian konflik internal Yaman merupakan dua proses yang saling memengaruhi, tetapi tidak dapat dipersamakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Creswell & Creswell, 2018). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi pustaka (*library research*). Sumber data mencakup dokumen resmi seperti Teks Pernyataan Bersama Trilateral Arab Saudi-Iran-Tiongkok (2023), artikel jurnal ilmiah terindeks SINTA dan Scopus, laporan dari lembaga kajian strategis (seperti International Crisis Group dan Council on Foreign Relations), serta publikasi media internasional yang kredibel.

Tahapan analisis data dilaksanakan melalui tiga langkah utama: (1) mengidentifikasi dan mengategorikan indikator persepsi ancaman Arab Saudi berdasarkan empat faktor Walt sebelum dan sesudah 2019; (2) mengidentifikasi tindakan diplomasi dan ekonomi Arab Saudi yang mencerminkan pola *hedging*; serta (3) melakukan sintesis data guna menarik kesimpulan analitis. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dokumen resmi, analisis akademis, dan laporan empiris kawasan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pilihan kebijakan luar negeri Arab Saudi, sedangkan kesepakatan 10 Maret 2023 diperlakukan sebagai peristiwa utama yang perlu dijelaskan. Untuk menjaga konsistensi, bahan pustaka dipisahkan antara sumber primer berupa pernyataan diplomatik resmi dan sumber sekunder berupa kajian teoretis serta penilaian para analis. Dokumen resmi digunakan untuk menetapkan komitmen yang benar-benar dinyatakan pihak terkait. Sementara itu, sumber analitis digunakan untuk menafsirkan motivasi dan konsekuensi kebijakan, dengan kesadaran bahwa penafsiran tersebut tidak selalu merupakan pernyataan langsung dari pengambil keputusan.

Proses interpretasi dilakukan melalui pencocokan pola antara indikator teoretis dan tindakan yang teramati. Pada kerangka balance of threat, fokusnya adalah kontinuitas kapasitas ancaman dan perubahan pendekatan Riyadh terhadap risiko eskalasi. Pada kerangka hedging, fokusnya adalah keberlanjutan hubungan pertahanan Saudi–Amerika Serikat di tengah pembukaan hubungan diplomatik dengan Iran dan penguatan kemitraan dengan Tiongkok. Penelitian ini tidak mengklaim hubungan sebab-akibat yang dapat diuji secara statistik, melainkan menyusun penjelasan yang masuk akal berdasarkan konsistensi antara konsep, urutan peristiwa, dan bukti dokumenter yang tersedia.

HASIL DAN DISKUSI

Persepsi Ancaman Saudi terhadap Iran

Berdasarkan kerangka *balance of threat,* lokasi geografis Iran di seberang Teluk Persia membuat ancaman terhadap Arab Saudi bersifat langsung. Dari segi kemampuan ofensif, perkembangan teknologi rudal balistik dan pesawat nirawak (*drone*) Iran beserta jaringan aktor non-negara sekutunya memberi kemampuan untuk menekan infrastruktur vital Saudi tanpa perlu konfrontasi militer konvensional secara terbuka. Serangan terhadap fasilitas pemrosesan minyak Saudi Aramco di Abqaiq dan Khurais pada September 2019 menjadi titik balik penting yang membuktikan kerentanan fisik tersebut (Ulrichsen, 2020).

Mengenai faktor niat ofensif, Riyadh memandang dukungan Teheran terhadap kelompok Houthi di Yaman sebagai bentuk proyeksi pengaruh yang mengancam keamanan wilayahnya. Namun, pasca-2019 terjadi pergeseran kalkulasi di tingkat elite Saudi: biaya ekonomi dan politik dari konfrontasi yang berlarut-larut dinilai jauh melampaui potensi keuntungannya. Ancaman Iran tidak dipersepsikan hilang, melainkan dikelola melalui saluran diplomasi guna menekan intensitas serangan lintas batas, sementara kapasitas pertahanan domestik tetap dipertahankan.

Pada dimensi kemampuan ofensif, penggunaan rudal dan pesawat nirawak memperluas pilihan penekanan militer di luar perang konvensional. Ancaman terhadap infrastruktur energi menjadi penting karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga gangguan terhadap kepastian produksi, distribusi, dan kepercayaan pelaku ekonomi. Serangan 2019 memperlihatkan bahwa kemampuan pertahanan yang besar tidak selalu menutup seluruh kerentanan objek strategis. Oleh karena itu, Saudi memiliki alasan rasional untuk menambah instrumen pencegahan berbasis komunikasi, sekalipun penguatan kapasitas pertahanan tetap diperlukan (Ulrichsen, 2020; Yahya, 2023).

Dimensi niat ofensif memerlukan kehati-hatian paling besar karena niat tidak dapat diamati secara langsung. Kesediaan Iran memulihkan hubungan diplomatik dapat menjadi sinyal bahwa sebagian konflik terbuka ingin dibatasi, tetapi tidak membuktikan perubahan seluruh tujuan geopolitiknya. Sebaliknya, kesediaan Riyadh berunding tidak berarti pemerintah Saudi telah menerima setiap posisi kebijakan Teheran. Yang dapat disimpulkan secara lebih proporsional ialah bahwa kedua negara melihat manfaat dari penyediaan saluran komunikasi untuk menurunkan risiko salah kalkulasi dan mengendalikan biaya konfrontasi. Kesimpulan tersebut sejalan dengan penilaian Alterman (2023) bahwa hubungan langsung dapat tetap berguna di tengah ketidakpercayaan mendalam.

Keraguan atas Jaminan Keamanan Amerika Serikat

Faktor pendorong utama penerapan strategi *hedging* oleh Arab Saudi adalah meningkatnya ketidakpastian terhadap komitmen jaminan keamanan Amerika Serikat. Respons Washington yang dinilai pasif setelah serangan Abqaiq-Khurais 2019, ditambah dengan fokus prioritas strategis AS yang bergeser ke kawasan Indo-Pasifik, memperkuat skeptisisme di kalangan negara Teluk (Cafiero, 2021; International Crisis Group, 2023).

Gause (2011) mencatat bahwa Arab Saudi secara historis mengandalkan kombinasi aliansi eksternal dan kebijakan regional yang aktif untuk menjaga stabilitas rezim. Dalam konteks 2023, pergeseran geopolitik global mendorong Riyadh untuk tidak lagi menggantungkan keamanan nasionalnya secara eksklusif pada satu kekuatan utama, melainkan merangkul Tiongkok sebagai penjamin hubungan diplomatik dengan Teheran tanpa memutus hubungan pertahanan mendasar dengan Amerika Serikat.

Keraguan terhadap jaminan keamanan Amerika Serikat tidak perlu dipahami sebagai hilangnya fungsi kerja sama pertahanan kedua negara. Perbedaannya terletak pada tingkat kepastian dan kecukupan perlindungan yang diperkirakan Riyadh dapat diperoleh dalam setiap skenario krisis. Ketika

serangan terhadap infrastruktur strategis menunjukkan adanya ruang kerentanan, pembuat kebijakan dapat memilih mengurangi ketergantungan pada respons eksternal dengan memperluas perangkat diplomasi dan pencegahan mandiri. Langkah demikian tetap konsisten dengan pemeliharaan hubungan keamanan Saudi–AS, sehingga lebih tepat disebut diversifikasi risiko daripada perpindahan aliansi secara total.

Penafsiran mengenai posisi Amerika Serikat juga harus mempertimbangkan keterbatasan kemampuan Washington dalam memediasi hubungan Saudi–Iran secara langsung. Alterman (2023) mencatat bahwa tidak adanya hubungan diplomatik langsung Amerika Serikat dengan Iran membatasi kelayakan Washington untuk memainkan peran perantara yang sama seperti Tiongkok. Karena itu, keberhasilan Beijing tidak dapat dijadikan bukti tunggal bahwa pengaruh keamanan Amerika Serikat di Teluk telah digantikan. Peran mediasi dan peran penjamin keamanan merupakan dua fungsi yang berbeda: suatu negara dapat unggul dalam membuka jalur perundingan tanpa otomatis memikul komitmen pertahanan yang setara.

Kepentingan Domestik: Visi 2030

Transformasi ekonomi domestik melalui agenda Visi 2030 memerlukan kepastian stabilitas kawasan. Program diversifikasi ekonomi yang diusung Pangeran Mohammed bin Salman membutuhkan arus investasi asing secara langsung, pengembangan sektor pariwisata, serta pembangunan megaproyek mega-infrastruktur seperti NEOM (Grand & Wolff, 2020).

Serangan drone lintas batas dan eskalasi militer di Teluk meningkatkan biaya risiko investasi (*risk premium*). Oleh karena itu, normalisasi hubungan dengan Iran diposisikan sebagai langkah pragmatis untuk meminimalkan gangguan keamanan regional demi mengamankan keberlanjutan program pembangunan domestik Arab Saudi (Al-Tamimi, 2022).

Keterkaitan antara stabilitas kawasan dan Visi 2030 terutama terletak pada kebutuhan mengurangi ketidakpastian jangka panjang. Proyek infrastruktur, transformasi pariwisata, dan pengembangan sektor nonminyak memerlukan aliran pembiayaan, tenaga kerja, serta perencanaan usaha yang bergantung pada ekspektasi stabilitas. Ketegangan keamanan yang terus berulang dapat memperbesar biaya mitigasi risiko, mengganggu kesinambungan proyek, dan memengaruhi keputusan investor. Oleh sebab itu, insentif Saudi untuk mengurangi ketegangan dengan Iran tidak hanya menyangkut penghindaran biaya perang, tetapi juga perlindungan terhadap prospek pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah (Grand & Wolff, 2020; Yahya, 2023).

Peran Tiongkok dan Pola Hedging

Keterlibatan Tiongkok sebagai mediator mencerminkan pola *hedging* Arab Saudi secara eksplisit. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Arab Saudi dan pembeli utama minyak mentah Saudi, di mana Tiongkok menyerap sekitar 15-20% dari total ekspor minyak harian Saudi dengan nilai perdagangan bilateral melebihi 100 miliar dolar AS (General Authority for Statistics Saudi Arabia, 2023). Tiongkok juga memiliki hubungan ekonomi dan energi yang erat dengan Iran.

Dengan memanfaatkan kredibilitas ekonomi Tiongkok di Teheran, Riyadh memperoleh jaminan diplomatik tanpa harus masuk ke dalam aliansi politik formal dengan Beijing. Tindakan ini memenuhi kriteria Kuik (2008) mengenai *hedging*, yakni memaksimalkan keuntungan ekonomi dan politik dari beberapa kekuatan besar sekaligus menghindari keterikatan pada satu kutub geopolitik.

Kapasitas Tiongkok sebagai perantara berakar pada hubungan yang dapat dijangkau kedua pihak. Beijing memiliki kepentingan menjaga kestabilan pasokan energi dan akses pasar, sementara Riyadh dan Teheran sama-sama memiliki alasan untuk menjaga hubungan yang produktif dengan Tiongkok. Posisi tersebut memberi Beijing modal diplomatik untuk menyediakan tempat perundingan yang dinilai dapat diterima. Akan tetapi, peran tersebut lebih tepat dipahami sebagai fasilitasi dan dukungan politik terhadap kesepakatan, bukan jaminan otomatis bahwa setiap klausul akan dapat ditegakkan oleh Tiongkok. Pernyataan bersama tidak menjabarkan sanksi atau mekanisme penegakan khusus apabila terjadi pelanggaran (Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, 2023).

Kebijakan Saudi juga menunjukkan perbedaan antara memperluas mitra dan mengganti patron strategis. Hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat menyediakan perangkat keamanan yang telah terbangun, sedangkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan dialog dengan Iran menyediakan manfaat diplomatik yang berbeda. Kombinasi tersebut memberi Riyadh ruang manuver untuk menghindari pilihan yang sepenuhnya eksklusif. Analisis CSIS menilai keterlibatan Beijing memperbesar profil diplomatik Tiongkok, tetapi tidak serta-merta menghapus kedudukan militer Amerika Serikat di Teluk (Alterman, 2023). Dari perspektif hedging, kemampuan mempertahankan beberapa opsi inilah yang menjadi aspek paling relevan.

Tabel 1. Strategi Hedging Arab Saudi

STRATEGI HEDGING ARAB SAUDI	
Sektor Keamanan	**Sektor Ekonomi & Diplomasi**
Mempertahankan kemitraan pertahanan dengan AS Modernisasi alutsista domestik Menjaga daya tangkal terhadap ancaman militer	Memperluas investasi dengan Tiongkok (Visi 2030) Membuka kanal diplomasi resmi dengan Iran

Normalisasi sebagai Pengelolaan Risiko, Bukan Akhir Rivalitas

Perkembangan situasi pasca-2023 mengonfirmasi bahwa kesepakatan Beijing tidak serta-merta menghapus persaingan mendasar antara Arab Saudi dan Iran. Eskalasi konflik regional pasca-Oktober 2023 di Gaza serta dinamika ketegangan militer antara Iran dan Israel pada kurun waktu 2024 hingga 2025 menjadi ujian nyata bagi kesepakatan tersebut.

Meskipun lanskap keamanan kawasan mengalami tekanan tinggi, saluran komunikasi diplomatik antara Riyadh dan Teheran tetap berfungsi secara aktif. Kemampuan kedua negara untuk mempertahankan saluran komunikasi di tengah krisis regional membuktikan bahwa normalisasi berfungsi efektif sebagai mekanisme *risk management* (pengelolaan risiko) guna mencegah keterlibatan Arab Saudi dalam konfrontasi militer secara langsung.

Kasus Yaman menjadi pengujian penting terhadap keterbatasan pendekatan bilateral. Jalal (2023) mengingatkan bahwa kepentingan kelompok Houthi dan aktor politik domestik Yaman memiliki dinamika sendiri yang tidak otomatis dapat diselesaikan melalui kesepakatan Riyadh–Teheran. Normalisasi dapat membuka ruang perundingan mengenai keamanan perbatasan Saudi atau pembatasan serangan, tetapi tidak cukup untuk memastikan lahirnya penyelesaian politik yang inklusif di Yaman. Dengan demikian, pengurangan ancaman terhadap Saudi dan perdamaian internal Yaman harus diperlakukan sebagai dua sasaran berbeda, sekalipun keduanya memiliki keterkaitan erat.

Terdapat pula penjelasan alternatif yang perlu dipertimbangkan. Normalisasi dapat dibaca bukan sebagai hedging, melainkan sebagai langkah de-eskalasi pragmatis akibat mahalnya konflik yang berkepanjangan. Kedua interpretasi tidak sepenuhnya saling meniadakan: de-eskalasi menerangkan tujuan langsung hubungan dengan Iran, sedangkan hedging menerangkan bagaimana langkah tersebut ditempatkan di antara berbagai hubungan strategis Riyadh. Untuk menguji keunggulan argumen hedging, peneliti perlu menunjukkan bahwa normalisasi berlangsung bersama pemeliharaan opsi keamanan dan perluasan mitra, bukan berdiri sendiri sebagai kompromi bilateral.

Batas lain dari kesimpulan penelitian ialah kemungkinan perubahan situasi eksternal setelah kesepakatan. Krisis regional dapat meningkatkan kembali persepsi ancaman, mengubah prioritas negara-negara besar, atau mempersempit ruang kompromi. Oleh karena itu, istilah pengelolaan risiko tidak boleh ditafsirkan sebagai kepastian bahwa konflik besar tidak akan terjadi. Kebijakan hedging justru bertumpu pada pengakuan bahwa hasil masa depan belum pasti. Selama kerja sama diplomatik tidak disamakan dengan penghapusan kompetisi strategis, normalisasi Saudi–Iran dapat dipahami sebagai instrumen yang fleksibel namun tetap memiliki keterbatasan struktural.

KESIMPULAN

Normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023 merupakan manifestasi dari strategi *hedging* Arab Saudi dalam merespons kalkulasi persepsi ancaman yang dinamis. Keputusan ini didorong oleh tiga faktor utama: tingginya risiko ekonomi akibat konfrontasi langsung pasca-2019, meningkatnya keraguan atas jaminan keamanan mutlak dari Amerika Serikat, serta kebutuhan mendesak akan stabilitas lingkungan regional untuk mendukung keberhasilan agenda Visi 2030. Mediasi Tiongkok memberi fleksibilitas diplomasi bagi Riyadh tanpa menggantikan posisi Amerika Serikat dalam struktur pertahanan mendasar.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder berupa literatur dan dokumen publik tanpa melibatkan data primer wawancara dengan pembuat kebijakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan keberhasilan strategi *hedging* Arab Saudi dengan negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Qatar.

Kontribusi analitis kajian ini terletak pada pembedaan antara sumber ancaman, pilihan respons, dan tujuan kebijakan. Teori balance of threat menjelaskan mengapa kemampuan ofensif Iran, kedekatan geografis, dan penilaian terhadap niat politik Teheran terus memengaruhi perhitungan Riyadh. Konsep

hedging kemudian menjelaskan mengapa Saudi dapat menurunkan ketegangan bilateral tanpa meninggalkan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat maupun kepentingan ekonominya dengan Tiongkok. Sementara itu, agenda Visi 2030 memperlihatkan alasan domestik yang membuat stabilitas kawasan semakin bernilai. Gabungan ketiga dimensi tersebut menghasilkan penjelasan yang lebih terbatas sekaligus lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada klaim bahwa kesepakatan Beijing mengakhiri rivalitas secara permanen.

Untuk pengembangan kajian berikutnya, indikator keberhasilan normalisasi dapat dibuat lebih terukur, misalnya melalui kontinuitas pertemuan diplomatik, perubahan intensitas insiden lintas batas, dinamika proses perundingan Yaman, dan kestabilan hubungan ekonomi-politik Saudi dengan mitra utamanya. Penelitian berbasis wawancara dan penelusuran proses kebijakan juga diperlukan untuk membedakan alasan yang secara terbuka dikemukakan pemerintah dari kalkulasi internal yang belum terdokumentasi. Dengan rancangan demikian, argumen tentang penurunan persepsi ancaman dan strategi hedging dapat diuji secara lebih ketat, tanpa menganggap satu peristiwa diplomatik sebagai bukti yang memadai bagi seluruh perubahan regional.

REFERENSI

Al-Tamimi, N. (2022). Saudi Arabia’s Vision 2030 and foreign policy: Economic diversification and regional stability. *Middle East Policy, 29*(3), 45-58.

Alterman, J. B. (2023, March 10). Why did China help Saudi Arabia and Iran resume diplomatic ties? Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/why-did-china-help-saudi-arabia-and-iran-resume-diplomatic-ties

Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press.

Cafiero, G. (2021). Saudi Arabia’s strategic hedging in a multipolar world. *Gulf International Forum, 12*(2), 14-29.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Fulton, J., & Yellinek, R. (2023). UAE and Saudi Arabia’s hedging strategy and China’s growing role in the Gulf. *Mediterranean Politics, 28*(4), 512-530.

Gause, F. G., III. (2010). *The international relations of the Persian Gulf*. Cambridge University Press.

Gause, F. G., III. (2011). *Saudi Arabia in the new Middle East* (Council Special Report No. 63). Council on Foreign Relations.

General Authority for Statistics Saudi Arabia. (2023). *International trade report: Fourth quarter 2022*. Kingdom of Saudi Arabia Press.

Grand, S., & Wolff, A. (2020). Assessing Saudi Vision 2030: A 2020 review. *Atlantic Council Research Reports, 8*(1), 1-24.

Guzansky, Y., & Lindenstrauss, G. (2023). The Saudi-Iran normalization agreement: Causes and regional implications. *Strategic Assessment, 26*(2), 15-28.

Hinnebusch, R., & Ehteshami, A. (Eds.). (2014). *The foreign policies of Middle East states* (2nd ed.). Lynne Rienner Publishers.

International Crisis Group. (2023). *Bridging the Gulf: The Saudi-Iran rapprochement and its regional implications* (Middle East Report No. 239). International Crisis Group.

Jalal, I. (2023, April 5). China and the Saudi-Iran rapprochement: Implications for Yemen. Middle East Institute. https://mei.edu/publication/china-and-saudi-iran-rapprochement-implications-yemen/

Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok. (2023, March 10). *Joint trilateral statement by the People's Republic of China, the Kingdom of Saudi Arabia, and the Islamic Republic of Iran*. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China.

Kuik, C.-C. (2008). The essence of hedging: Malaysia and Singapore's response to a rising China. *Contemporary Southeast Asia, 30*(2), 159-185.

Ulrichsen, K. C. (2020). *The Gulf states in international political economy*. Palgrave Macmillan.

Utomo, A. (2023). Mediasi Tiongkok dalam rekonsiliasi diplomatik Arab Saudi dan Iran tahun 2023: Pergeseran peta geopolitik Timur Tengah. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia, 5*(1), 34-49.

Walt, S. M. (1987). *The origins of alliances*. Cornell University Press.

Yahya, M. (2023, March 13). A revolutionary resolution? Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2023/03/a-revolutionary-resolution